



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

KEBIJAKAN PENAIKAN SUKU BUNGA ACUAN BI SEBAGAI UPAYA MITIGASI RISIKO PENINGKATAN INFLASI

Venti Eka Satya

Analisis Legislatif Ahli Madya

venti.satya@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) pada 22-23 Agustus 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 3,75%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,00%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 25 bps menjadi 4,50%. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah *pre emptive* dan *forward looking* untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan inflasi *volatile food*, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, di tengah pertumbuhan ekonomi domestik yang semakin kuat. Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan memperkuat pemulihan, dan salah satunya adalah dengan memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang sesuai dengan kenaikan suku bunga BI7DRR tersebut untuk memitigasi risiko kenaikan inflasi inti dan ekspektasi inflasi. Selain itu, BI juga memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi dengan intervensi di pasar valas baik melalui transaksi *spot*, *Domestic Non Deliverable Forward* (DNDF), serta pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Kebijakan BI menaikkan suku bunga acuan untuk pertama kalinya dilakukan sejak Februari 2021, dimana suku bunga dipertahankan di level 3,50 persen. Sebelumnya, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, memprediksi BI berpeluang akan menaikkan suku bunga acuan sebanyak 50-70 bps di sisa tahun 2022. Perkiraan ini didasarkan pada ekspektasi penurunan surplus transaksi berjalan pada Semester II-2022 dan upaya untuk menahan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga. BI diperkirakan akan mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 50-75 bps hingga akhir tahun ini.

Semenjak awal tahun 2022, perekonomian dunia sudah diramalkan dalam kondisi yang tidak begitu baik. Pada 2023, perekonomian dunia diprediksi akan semakin lesu. Hal ini dikarenakan kondisi geopolitik yang berimbas pada kenaikan laju inflasi serta risiko stagflasi. Stagflasi ditandai dengan kenaikan tajam inflasi di suatu negara. Risiko stagflasi tersebut dialami oleh banyak negara. Namun, Bank Indonesia meyakini perekonomian Indonesia tetap kuat, meskipun kondisi global berpotensi melemah. Perekonomian Indonesia kuat secara fundamental. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi triwulan II/2022 tercatat tumbuh mencapai 5,4%, lebih tinggi dibandingkan 2020. Realisasi *Produk Domestik Bruto* (PDB) dan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Realisasi PDB triwulan II 2022 sebesar 5,44% (*year on year/yoy*), jauh lebih tinggi dari prakiraan dan capaian triwulan sebelumnya sebesar 5,01% (*yoy*). Tingginya pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga, serta tetap tingginya kinerja ekspor. NPI pada triwulan II 2022 mencatat surplus, ditopang oleh surplus transaksi berjalan yang meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan perbaikan defisit transaksi modal dan finansial.

Ekonomi dunia masih berada dalam kondisi pasca pandemi dan BI melihat makro ekonomi Indonesia kuat dalam menghadapi badai inflasi. BI pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh dalam kisaran konservatif antara 4,7-5,5%. Hal ini merupakan pertanda bahwa kita harus tetap waspada terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global yang akan mempengaruhi harga komoditas domestik karena kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi global akan tetap berpengaruh. Oleh karena itu, BI menilai kombinasi kebijakan *pro growth* dengan *pro stability*, yang dibaurkan dengan kebijakan fiskal yang akomodatif dan *prudent* serta stabilitas sektor jasa keuangan dapat mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas.

Atensi DPR

BI terus berupaya untuk menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Setelah berusaha untuk menahan suku bunga acuan sejak Februari 2021, akhirnya pada bulan ini, BI memutuskan untuk menaikkan BI7DRR suku bunga *Deposit Facility*, dan suku bunga *Lending*. DPR RI, dalam hal ini Komisi XI, perlu mengawasi upaya yang dilakukan BI dan otoritas moneter terkait dalam menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, Komisi XI dalam kewenangannya mengawasi belanja negara juga perlu memberikan solusi alternatif bagi upaya pengendalian inflasi domestik melalui kebijakan penganggaran dan kebijakan terkait lainnya. Dalam kondisi ekonomi yang kurang menggembirakan seperti saat ini, kehadiran negara sangat dibutuhkan dalam pengendalian harga untuk menahan laju inflasi. Hal ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat serta menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional.

Sumber

bi.go.id, 23 Agustus 2022;
bisnis.indonesia.com, 23 Agustus 2022;
cnnindonesia.com, 22 & 23 Agustus 2022;
katadata.co.id, 23 Agustus 2022; dan
kompas.com, 23 Agustus 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q
Dian Cahyaningrum
Edmira Rivani
Nidya Waras Sayekti
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.